

Sikapi Temuan BPK Bentuk Pansus

MEMPAWAH. Usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kerugian Daerah akhirnya mendapat persetujuan lembaga DPRD Kabupaten Pontianak melalui paripurna, Kamis (1/3). Pansus itu nantinya akan bekerja menyikapi temuan BPK RI Perwakilan Kalbar senilai Rp 10 Miliar terhadap pengelolaan keuangan APBD kabupaten tersebut.

"Sebagaimana niat saya beberapa waktu lalu untuk membentuk pansus guna menindaklanjuti kerugian daerah dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak. Usulannya telah disampaikan melalui paripurna. Alhamdulillah, pimpinan dan lembaga menyetujui pembentukan pansus tersebut," kata Susanto, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak.

Pria yang juga penggagas pembentukan pansus ini menegaskan, dalam usulan pansus tersebut dirinya telah mendapatkan dukungan dari sebagian anggota DPRD Kabupaten Pontianak. Dukungan itu dibuktikan dengan tanda tangan yang dilampirkan secara tertulis sebagai pengusul pembentukan Pansus.

"Selanjutnya kita tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari DPRD terkait pembentukan Pansus tersebut. Setelah SK keluar, maka pansus segera dibentuk dan disusun. Bagaimana komposisi pansus, tinggal kebijakan fraksi masing-masing untuk mengirimkan perwakilannya," jelas Susanto.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini berharap, Pansus Kerugian Daerah yang dibentuk DPRD nantinya dapat bekerja

dengan baik dan profesional. Sehingga pansus dapat mencapai tujuannya yakni mengembalikan kerugian daerah hasil audit BPK senilai Rp 10 miliar lebih itu.

"Mudah-mudahan akan tersusun komposisi pansus yang solid dan mampu bekerja dengan profesional. Yang terpenting hasil kerja Pansus dapat mengembalikan kerugian daerah yang nilainya cukup besar tersebut," harap Susanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Sabli Awaluddin menyatakan, sangat mendukung keinginan anggota dewan untuk membentuk Pansus Kerugian Daerah tersebut. Sebab, pelaksanaan Pansus merupakan salah satu bagian dari tupoksi yang diemban lembaga DPRD sebagai pelaksana pemerintahan.

"Melaksanakan pansus me-

ngan hak DPRD. Jadi sah-sah saja jika ada anggota yang berkeinginan membentuk Pansus. Apalagi, permasalahan yang dipansuskan sangat penting dan prioritas menyangkut kepentingan publik dan daerah, tentu harus kita dukung bersama," ujar dia.

Hanya saja, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pontianak ini mengingatkan, pansus yang dibentuk nantinya benar-benar melaksanakan tupoksinya dengan baik. Artinya, pansus dapat bekerja secara profesional untuk mencapai satu tujuan kepentingan masyarakat dan daerah itu sendiri.

"Jika memang pansus ini dapat mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan, tentu sangat positif. Apalagi, sebagaimana angka kerugian yang ditemu-

kan BPK tersebut cukup besar mencapai Rp 10 miliar lebih. Tentunya kerugian tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dapat dikembalikan ke kas daerah dan direalisasikan untuk kegiatan lainnya di masyarakat," ujarnya.

Dukungan pembentukan Pansus juga datang dari Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pontianak. Fraksi berlambang kabah ini berharap Pansus dapat bekerja dengan optimal dan maksimal. "Tentu kita setuju. Apalagi tujuan pansus itu sendiri sangat baik yakni mengembalikan kerugian negara. Namun, kita juga akan mempelajari terlebih bahan yang nantinya akan dipansuskan. Sehingga kinerja pansus lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya," pungkas Ketua Fraksi PPP, Basri.(shn)